

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BELANJA PADA LAPORAN
REALISASI ANGGARAN BELANJA DPKD KABUPATEN SIJUNJUNG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai salah Satu persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :
MERNIATI
NIM. 15221

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BELANJA PADA LAPORAN
REALISASI ANGGARAN BELANJA DPKD KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nama : Merniati
NIM : 15221
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

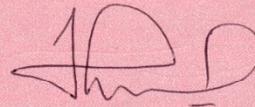
Padang, Februari 2015

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III



Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA BELANJA PADA LAPORAN
REALISASI ANGGARAN BELANJA DPKD KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nama : Merniati
TM/NIM : 2009/15221
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2015

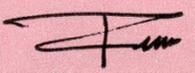
Tim Penguji,

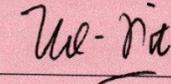
Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
2. Anggota : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
3. Anggota : Nelvirita, SE, M.Si, Ak







SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Merniati
Thn. Masuk/NIM : 2009/15221
Tempat/Tgl. Lahir : Samosir/ 08 Juni 1990
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan cendrawasih No.21 C Air Tawar Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja DPKD Kabupaten Sijunjung

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2015
Yang menyatakan,


Merniati

NIM. 15221



ABSTRAK

MERNIATI (15221/09)

: Analisis Pengukuran Kinerja Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja (pada DPKD Kabupaten Sijunjung)

Pembimbing

:Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selisih antara belanja dan anggaran serta mengetahui bagaimana peningkatan kinerja anggaran belanja DPKD Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan di DPKD Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran DPKD Provinsi Sumatera Barat dan buku-buku serta peraturan perundangan yang mengatur tentang Realisasi anggaran belanja daerah.

Data yang digunakan dalam menganalisis adalah Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja DPKD Kabupaten Sijunjung 2010 sampai dengan 2012 . Teknis analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, analisis efisiensi belanja.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :a). Pada analisis varians terdapat selisih belanja dengan realisasi, yang mana anggaran belanja yang terserap sebesar 90,17% dari APBD b). Pada analisis pertumbuhan belanja tahun 2010 rasio pertumbuhan sebesar 0,050% tahun 2011 sebesar 0,104% dan tahun 2012 sebesar 0,188% .c) Pada tahun 2010-2012 analisis keserasian belanja operasi dan belanja modal DPKD menunjukkan rasio sebesar 0,993% untuk belanja operasi, dan sebesar 0,012 % untuk belanja modal. Sedangkan untuk analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung untuk tahun 2010-2012 telah sesuai dengan ketentuan, bahwasannya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.d) Pada tahun 2010-2012 realisasi belanja pada analisis efisiensi belanja DPKD adalah 82. Hal ini menunjukkan adanya produktifitas dan efektifitas belanja daerah yang dilakukan oleh DPKD Kabupaten Sijunjung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Analisis Pengukuran Kinerja Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja DPKD Kabupaten Sijunjung”.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Almarhum ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak dan Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak sebagai pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Prof. Yunia Wardi, Drs., M.Si
3. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc selaku Ketua Prodi D3 Fakultas Ekonomi.
4. Bapak Fefri Indra Azra, SE, M.Si, Ak dan ibu Nelverita SE, M.Si. Ak sebagai penguji, yang telah bersedia menjadi penguji, memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tugas akhir ini
5. Ibu Nelverita SE, M.Si. Ak, sebagai Pembimbing Akademik penulis.

6. Teristimewa penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang sangat penulis hormati serta abang, kakak, adik dan abang rusman simrmata tercinta yang tak bosan-bosannya memberikan doa, dukungan moril dan materil.
7. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
8. Rekan- rekan mahasiswa Program Studi DIII FE UNP khususnya Akuntansi DIII.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya Tugas Akhir ini, dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Laporan Realisasi Anggaran	9
1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	10
2. Isi Laporan Realisasi Anggaran	11
3. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	12
4. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	12
5. Struktur Laporan Realisasi Anggaran	13
6. Periode Pelaporan.....	14
7. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	14
B. Pengukuran Kinerja	14
1. Penilaian Kinerja.....	16
2. Tujuan dari penilaian kinerja sektor publik	17
3. Aspek-aspek pengukuran kinerja	18
4. Sistem manajemen kinerja ektor	29
5. Pelaporan kinerja.....	20
6. Evaluasi kinerja.....	21
C. Klasifikasi Laporan Keuangan Menurut PSAP Nomor 71 Tahun 2010..	22

1. Pendapatan	22
2. Belanja.....	23
3. Pembiayaan	31

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Rancangan Penelitian	35
D. Teknis Analisis Data	37

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan.....	39
B. Pembahasan	41
1. Analisis Varians Belanja.....	41
2. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	43
3. Analisis Keserasian Belanja.....	45
4. Rasio Efisiensi Belanja.....	51
C. Hasil Penelitian.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Varians Belanja Tahun 2010-2012.....	48
Tabel 2	: Pertumbuhan Belanja Tahun 2010-2012.....	50
Tabel 3	: Belanja Operasi dan Belanja Modal 2010-2012.....	53
Tabel 4	: Belanja Langsung dan Tidak Langsung 2010-2012.....	56
Tabel 5	: Efisiensi Belanja Tahun 2010-2012.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran DPKD Tahun 2010-2012
Lampiran 2 : Surat Permohonan Observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dapat diartikan (UU No. 12 tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004) sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor-faktor tersebut adalah kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan, kemampuan keuangan daerah. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor essential untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, karena

hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainya serta membantu mengevaluasi tingkat efesien dan efektifitas.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desntralisasi fiskal yang telah membawa perkembangan di Indonesia. Selain itu juga telah terjadi modernisasi dalam sistem manajemen publik dan pemerintahan yang lebih menekankan pada prinsip pengukuran kinerja. Pengukuran kineja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, memotivasi pegawai, menciptakan akuntabilitas publik (Mahmudi,2007: hal 14). Pelaksanaan otonomi daerah yang didasari UU No. 22 Tahun 1990 tentang pemerintahan daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran Pemerintah Daerah. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup manajemen. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah, anggaran sebagai alat perencanaan, sebagai pengendalian, anggaran sebagai alat kebijakan, anggaran sebagai alat polotik, anggaran sebagai penilaian kinerja, dan sebagai alat motivasi.

Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas efektif organisasi. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrument kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan poliik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para legislator. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah ada beberapa pernyataan salah satunya adalah laporan realisasi anggaran. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan dikaji dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Didalam Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi, pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Diketuinya surplus atau defisit suatu data dari laporan realisasi anggaran tersebut telah diatur dalam undang-undang, salah satunya dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 56 dan pasal 57 tentang perbedaan antara surplus dan defisit suatu dana yang sudah dikeluarkan dan tertuang dalam laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi anggaran dibuat sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi dan mengendalikan pembelanjaan langsung operasi yang terjadi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung. Oleh demikian untuk memenuhi pelayanan Pemerintah kepada Publik akan terpenuhi,

maka pemerintah membuat Laporan Realisasi Anggaran untuk diketahui berapa dana yang akan dianggarkan dan berapa anggaran akan direalisasikan, untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akurat dengan anggaran menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektifitas.

Setiap anggaran dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai, terdapat indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan anggaran, meliputi indikator input, output, dan outcome anggaran. Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode, maka sisa anggaran tersebut tidaklah “hangus” tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dengan demikian, keberadaan SiLPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja anggaran yang baik pada tahun anggaran bersangkutan. Namun tidak semua penganggaran yang dilakukan oleh DPKD tidak memenuhi target, sehingga menyebabkan ditundanya kegiatan, padahal kegiatan tersebut merupakan prioritas dalam anggaran tahun tersebut.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Secara normatif, anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran tersebut, pembaca laporan keuangan dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis anggaran antara lain berupa : (1) Analisis Varians Belanja (2) Analisis Pertumbuhan Belanja (3) Analisis Keceragaman Belanja (4) Rasio Efisiensi Belanja.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilitas.

Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintahan daerah perlu harmonisasi belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak dianggap baik untuk rasio ini, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menulis masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ **Analisis Pengukuran Kinerja Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sijunjung**”

B. Perumusan Masalah

Dari pendahuluan yang dikemukakan diatas tadi, maka masalah pokok yang timbul dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Belanja pada DPKD Kab.Sijunjung berdasarkan Analisis Varians Belanja.
2. Bagaimana pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Belanja pada DPKD Kab.Sijunjung berdasarkan Analisis Pertumbuhan Belanja.
3. Bagaimana pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Belanja pada DPKD Kab.Sijunjung berdasarkan Analisis Keserasian Belanja.
4. Bagaimana pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Belanja pada DPKD Kab.Sijunjung berdasarkan Rasio Efisiensi.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di ajukan, maka tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja pada DPKD Kab.Sijunjung ditinjau dari rasio belanja daerah tahun 2010-2012 yaitu berdasarkan:

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Universitas

Negeri Padang

2. Dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada DPKD Kab.Sijunjung berdasarkan rasio 1). Analisis Varians Belanja 2). Analisis Pertumbuhan Belanja 3). Analisis Keserasian Belanja 4). Rasio Efisiensi Belanja Bagi pemerintahan daerah, dapat memeberikan sumbangan terhadap badan atau dinas yang terkait, khususnya yang berhubungan denga analisis Laporan Realisasi anggaran.
3. Diharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menganalisa masalah yang timbul terhadap Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada DPKD Kab.Sijunjung.
4. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka pikir peneliti dan dapat dijadikan referensi untuk para peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan komponen dalam penyusunan laporan keuangan pada sektor pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD), dan
- c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut Indra Bastian (2010:191) pengertian anggaran adalah sebagai berikut:

“Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang”

Governmental Accounting Standards Board (GASB), seperti yang dikutip Indra Bastian (2010:191) mendefenisikan anggaran (budget) sebagai berikut:

“Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Freeman (2003) yang dikutip oleh Deddi Noordiawan (2008:19):

“Anggaran adalah sebuah proses yang dilakuakn oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)”

PP No. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

“Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan”.

Dari defenisi diatas disimpulkan bahwa anggaran merupakan penghubung antar sumber daya keuangan dengan prilaku manusia. Sehingga tujuan utama untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya mencapai tujuan organisasi yang disusun dalam unit kesatuan dalam periode waktu tertentu.

1.Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 Tahun 2010, Laporan realisasi anggaran adalah:

“Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”.

Menurut Permendagri No.4 Tahun 2008 Laporan realisasi anggaran adalah:

“ Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu”.

2. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, isi laporan realisasi anggaran mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- 2) Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.
- 3) Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang

material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA
- b) Belanja
- c) Tranfer
- d) Surplus/defisit-LRA
- e) Penerimaan pembiayaan
- f) Pengeluaran pembiayaan
- g) Pembiayaan netto
- h) Sisa lebih/kuang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

3. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana diterapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, manfaat Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
 - b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.

Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan dan belanja daerah

5. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
- b. Cakupan entitas pelaporan
- c. Periode yang dicakup
- d. Mata uang pelaporan
- e. Satuan angka yang digunakan

6. Periode Pelaporan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan satu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

7. Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam laporan realisasi anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau di catatan atas laporan keuangan.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan sektor publik kedalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

Defenisi kinerja menurut Indra Bastian (2006:329) adalah:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategiic planning*) suatu organisasi. Sedangkan menurut Larry D Stout (1993) dalam Bastian menyatakan “pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mision accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses”. Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. “pengukuran/ penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas. (James B. Whittaker)

“Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut (Otley, 1999). Hasil kerja sendiri (*outcomes of work*), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Rogers, 1994)

Kinerja pemerintahan dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan berbagai unit kerja.

Menurut Robertson, 2002 (Mahmudi, 2007:6) pengukuran kinerja adalah; “Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa , perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan”. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi dan bagian penting dari proses pengendalian manajemen. Tujuan pengukuran adalah untuk menilai hasil kinerja (*performance outcome*) ataupun menilai perilaku.

1. Penilaian Kinerja

Menurut Mardiasmo (2005:122) menjelaskan bahwa penilaian kinerja memiliki tujuan atau manfaat bagi manajemen untuk:

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
- b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- d) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
- e) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- f) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- g) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2. Tujuan dari penilaian kinerja sektor publik adalah:

- a) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c) Memperbaiki kinerja periode berikutnya
- d) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
- e) Memotivasi pegawai
- f) Menciptakan akuntabilitas publik

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- a. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah pada periode-periode sebelumnya
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera.

Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin memulai upaya pengukur kinerja dan tidak perlu mengharap pengukuran kinerja akan langsung sempurna. Nantinya perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah disusun akan dilakukan.

2. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai proses yang berkelanjutan (*on- going proses*)

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan cerminan dari upaya organisasi untuk selalu berupaya dalam memperbaiki kinerja.

3. Sesuai proses pengukuran kinerja dengan organisasi

Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja sesuai dengan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi.

3. Aspek- Aspek Pengukuran Kinerja

Menurut Indra (2002:331) pengukuran kinerja dilakukan untuk aspek-aspek berikut:

a. Aspek Financial

Aspek financial meliputi anggaran atau *cash flow*. Aspek financial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

b. Kepuasan Pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan.

c. Operasi dan Bisnis Internal

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategi.

d. Kepuasan pegawai

Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata. Apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran perusahaan sulit untuk dihindari.

e. Keputusan pegawai

Pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan dari para stakeholder

f. Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja, sehingga informasi yang dibutuhkan diharapkan relevan dan *up to date*

4. Sistem Manajemen Kinerja Sektor Publik

Mahmudi (2007:16) manajemen kinerja membutuhkan proses sistematis. Untuk itu, perlu dibuat desain sistem manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal.

Tahap-tahap sistem manajemen kinerja meliputi:

- a. Tahap perencanaan kinerja
- b. Tahap pelaksanaan kinerja
- c. Tahap penilaian kinerja
- d. Tahap review kinerja
- e. Tahap perbaikan kinerja

5. Pelaporan Kinerja

Informasi tentang kinerja menjadi informasi penting yang dibutuhkan di setiap fase perjalanan organisasi sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek perencanaan, informasi tentang kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi perencanaan. Informasi kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Seperti layaknya indikator dan rambu saat berkendara, informasi kinerja berguna bagi organisasi untuk

mengetahui posisi dan keberadaannya sehingga dapat mengatur strategi dan terombosan yang diperlukan.

Informasi tentang kinerja dalam laporan pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran menjadi titik lengkap.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, ada kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan Penskema Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya.

6. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tugas yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah kegagalan atau keberhasilan kepala daerah. Evaluasi kinerja adalah analisis dan interpretasi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam evaluasi kinerja ini tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila dilakukan dengan cara atau metode yang tidak tepat.

Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil optimal apabila dilakukan dengan cara atau metode yang tidak tepat. Cara-mcara evaluasi kerja menurut Tim

Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dalam buku Pengukuran Kinerja adalah dengan membandingkan antara:

- a. Tingkat kinerja yang diidentifikasi sebagai tujuan dengan tingkat kinerja yang nyata.
- b. Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik dibidangnya.
- c. Realisasi dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi
- d. Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi periode yang sama tahun lalu
- e. Rencana evaluasi lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini

Dalam akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan substansinya, maka perlu akuntabilitas, kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimasukan untuk membantu kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemertintah.

C. Klasifikasi Laporan Keuangan menurut PSAP Nomor 71 Tahun 2010

1. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahu anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut Mahmudi (2007: 121) Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintahan daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.

Menurut SAP Nomor 71 tahun 2010 pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompesasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, namun pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal

sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah. Sebagai berikut:

- I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
- II. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
 - a. Bagi Hasil Pajak
 - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - c. Dana Alokasi Umum
 - d. Dana Alokasi Khusus
 - e. Dana Otonomi Khusus
 - f. Dana Penyesuaian
- III. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
 - a. Bagi Hasil Pajak
 - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - c. Bagi Hasil Lainnya
- IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

2. Belanja

a. Pengertian Belanja

Berdasarkan SAP, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas dari rekening Kas Umum Daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Perbedaannya adalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRD.

b. Klasifikasi Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penaggganannya dalam bagian atau bidang tertentu antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Menurut Bastian (2001:144), “ Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belanja adalah jenis belanja yang timbulnya berdampak langsung kepada

erkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank.” Belanja operasi meliputi pengeluaran barang dan jasa (belanja pegawai, belanja barang dan jasa lain-lain).

Untuk lebih mengutakan lagi secara hukum, berdasarkan SAP No. 71 Tahun 2010 “belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Penegelompokan belanja menuerut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dituangkan dalam peraturan pemerintahan No 71 Tahun 2010 meliputi:

1. Klasifikasi Ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat meliputi:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang
- c. Belanja modal
- d. Belanja bunga
- e. Belanja subsidi
- f. Belanja hibah
- g. Belanja bantuan sosial
- h. Belanja lain-lain

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintahan daerah meliputi:

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - a. Belanja pegawai

- b. Belanja barang
 - c. Belanja bunga
 - d. Belanja subsidi
 - e. Belanja hibah
 - f. Belanja bantuan sosial
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
 3. Belanja tak terduga/ lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang .
2. Klasifikasi berdasarkan ekonomi, klasifikasi ini berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran
- a. Belanja untuk pemerintah pusat yaitu belanja per Kementerian Negara/Lembaga beserta unit Organisasi bawahannya
 - b. Belanja untuk pemerintah daerah meliputi:
 - 1) Belanja Sekretariat DPRD
 - 2) Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota
 - 3) Dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota
 - 4) Lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota
3. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi berdasarkan fungsi yaitu:
- a. Belanja pelayanan umum

- b. Belanja pertahanan
- c. Belanja ketertiban dan keamanan
- d. Belanja ekonomi
- e. Belanja perlindungan lingkungan hidup
- f. Belanja perumahan dan pemukiman
- g. Belanja kesehatan
- h. Belanja pariwisata dan budaya
- i. Belanja pendidikan
- j. Belanja perlindungan sosial

c. Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran khususnya belanja antara lain dengan cara:

- a. Analisis Varian Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua yaitu: 1) selisih menguntungkan (*favorable variance*) yaitu realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya. 2) selisih tidak menguntungkan (*unfavorable variance*) yaitu realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan. Pertama hal yang menunjukkan efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadinya kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

$\text{—————} \times 100\%$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilitas. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintahan daerah perlu harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja berupa, analisis belanja operasi dan belanja modal.

Rasio belanja operasi
Terhadap Total belanja = $\text{—————} \times 100\%$ _h
Rasio belanja modal
Terhadap Total belanja = $\text{—————} \times 100\%$ _h

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

Analisis belanja langsung dan tidak langsung

Rasio belanja langsung
Terhadap Total belanja = $\text{—————} \times 100\%$ _h
Rasio belanja tidak langsung

$$\text{Terhadap Total belanja} = \frac{\quad}{h} \times 100\%$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak dianggap baik untuk rasio ini, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Analisis efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rasio berikut:

$$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi 2007

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimasukkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divesatasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan

antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjumlahan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencarian dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode thun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

Bahwasannya dari hasil pembahasan yang telah dibuat penulis pada Bab sebelumnya, Maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Belanja DPKD pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja DPKD dari tahun 2010-2012 sudah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dilihat dari hasil rasio pengukuran kinerja belanja yang mencapai target anggaran yaitu 90%-100%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

Dengan adanya perhitungan rasio-rasio analisis belanja daerah yang telah dianalisis oleh penulis, diharapkan DPKD Kabupaten Sijunjung dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja yang telah ada serta lebih melaksanakan anggaran belanja secara efektif, efisien, dan ekonomis.